

ABSTRAK

Panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara merupakan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan dan desa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, salah satunya adalah harus berasal dari penduduk setempat. Persyaratan itu membatasi warga negara yang bukan berasal dari penduduk setempat untuk mendaftar. Hal itu sangat membatasi hak-hak warga negara, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar menjadi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, karena itu muncul permasalahan bagaimana politik hukum pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara dan bagaimana pengaturan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa dalam pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi calon anggota penyelenggara pemilihan ditingkat desa dan kecamatan yaitu panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Panitia pemilihan suara dan Panitia pemungutan suara tanpa adanya tindakan diskriminatif, dan juga pengaturan persyaratan harus penduduk setempat tidak tepat melihat bisa jadi seseorang yang bukan penduduk setempat lebih mampu dan bekerja secara penuh waktu.

Kata kunci: persyaratan calon anggota Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara. Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The committee chooses the sub-district and the voting committee is the sub-district and village election committee. There are several requirements that must be chosen by prospective members of the sub-district and collection committee, one of which is to be from the local population. This requirement changes citizens who do not come from local residents to register. It is very different for each person, everyone has the same right to register as a member of the sub-district election committee and the voting committee, because that is a problem that must be done by people in this region. voice and how the arrangement must be domiciled in the working area The district and voting committee is reviewed from the point of view of human rights.

The research method used in this study is using the normative research method with the information-invitation approach method.

Based on the research results generated in the tariff setting must be domiciled in the area that is a member of the sub-district election committee and the voting committee for people who will become candidates for the implementation of district and sub-district elections namely the sub-district election committee and the voting committee. Because every citizen who has the same member to become a member of the voting committee and the voting committee without discriminatory actions, and also determine the population is not right, can be done for a moment that non-local residents are more capable and work full time.

Keywords: Acceptance of prospective members of the sub-district election committee and voting committee. Human rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II DOMISILI DAN BEBERAPA TEORI.....	18
2.1 Pengertian Domisili	18
2.2 Teori Politik Hukum	19
2.3 Teori Negara Hukum	21
2.4 Teori Konstitusi	26
2.5 Teori Demokrasi	31
2.6 Teori Hak Asasi Manusia.....	37
BAB III POLITIK HUKUM DAN PERSYARATAN BERDOMISILI BAGI CALON ANGGOTA PPK DAN PPS.....	41
3.1 Politik Hukum Pengaturan Persyaratan Harus Berdomisili Dalam Wilayah Kerja Bagi Calon Anggota PPK dan PPS	41
3.2 Pengaturan Persyaratan Harus Berdomisili Dalam Wilayah Kerja Bagi Calon Anggota PPK dan PPS Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	47

BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan suara